**PERLINDUNGAN TERHADAP INTERNATIONAL COMMITTEE OF
THE RED CROSS (ICRC) DALAM KONFLIK BERSENJATA
INTERNASIONAL MENURUT KONVENSI JENEWA TAHUN 1949**

***PROTECTION OF THE INTERNATIONAL COMMITTEE OF THE RED
CROSS (ICRC) IN INTERNATIONAL ARMED CONFLICT ACCORDING
TO THE 1949 GENEVA CONVENTION***

Marfuah

Universitas Pasir Pengaraian

marfuah@upp.ac.id

Abstrak

Penelitian ini mengkaji tentang perlindungan hukum yang diberikan kepada ICRC yang merupakan sebuah organisasi kemanusiaan yang kerap mendapatkan praktik kekerasan di negara yang sedang terjadi konflik bersenjata internasional. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji dan membahas lebih dalam tentang perlindungan terhadap ICRC dalam konflik bersenjata internasional menurut Konvensi Jenewa Tahun 1949 dan apa yang menjadi faktor penghambat dalam perlindungan terhadap ICRC dalam konflik bersenjata internasional tersebut. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yakni studi dokumen berdasarkan literatur serta peraturan yang berkaitan dengan pembahasan tersebut, namun juga akan dibandingkan dengan pendapat ahli yang ada. Dari hasil penelitian penulis, bahwa perlindungan terhadap ICRC diatur dalam beberapa Pasal Konvensi Jenewa Tahun 1949 yang mana pada inti dari kesemua pasal adalah memberikan penghormatan dan perlindungan khusus kepada ICRC. Adapun pelanggaran terhadap upaya perlindungan ICRC juga merupakan suatu pelanggaran terhadap Hukum Humaniter Internasional yang mana pelanggaran Hukum Humaniter Internasional ini bersifat tanggung jawab pidana sehingga hukuman pidana merupakan akibat langsung dari pelanggaran tersebut.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, ICRC, Konvensi Jenewa

Abstract

This study examines the legal protection given to the ICRC, a humanitarian organization that often experiences violent practices in countries experiencing international armed conflict. The purpose of this study is to examine and discuss in more depth the protection of the ICRC in international armed conflict according to the 1949 Geneva Convention and what are the inhibiting factors in protecting the ICRC in international armed conflict. The research method used in this study is normative legal research, namely document studies based on literature and regulations related to the discussion, but will also be compared with existing expert opinions. From the results of the author's research, the protection of the ICRC is regulated in several Articles of the 1949 Geneva Convention, the core of which is to provide special respect and protection to the ICRC. Violations of ICRC protection efforts are also violations of International Humanitarian Law, where violations of International

Humanitarian Law are criminally responsible so that criminal penalties are a direct result of the violation.

Keywords : *Legal Protection, ICRC, Geneva Conventions*

A. Pendahuluan

Perang, sengketa bersenjata atau konflik bersenjata merupakan suatu kata yang tidak asing lagi kita dengar. Perang sudah mulai terjadi sejak berabad-abad tahun yang lalu dan hampir terjadi di setiap negara di belahan bumi ini. Pihak-pihak yang turut serta dalam situasi perang adalah personil militer (*combatan*) dan pihak-pihak yang bersengketa dan penduduk sipil (*civilian*).

Komite Internasional Palang Merah (*International Committee of the Red Cross*) adalah salah satu golongan penduduk sipil yang terlibat dalam situasi konflik bersenjata internasional. ICRC merupakan sponsor utama dalam penyusunan Konvensi Jenewa 1949, berkonsekuensi melibatkan diri dalam setiap peperangan untuk membantu korban perang dan mengingatkan para pihak yang sedang bertikai atau bersengketa untuk bertindak dalam batasan-batasan yang sudah disepakati bersama.

Kasus penyerangan terhadap ICRC dalam konflik bersenjata internasional sudah beberapa kali terjadi. Diantaranya

dapat dilihat pada sengketa yang terjadi antara Irak dan Amerika pada bulan Maret sampai April 2003, yang mengakibatkan Irak mengalami keadaan yang sangat memprihatinkan. Gambaran buruknya keadaan Irak tersebut dapat dilihat dari keinginan PBB dan ICRC untuk menarik perwakilannya dari Irak, karena kedua lembaga tersebut merasa terancam.¹

Penyerangan terhadap ICRC juga terjadi pada saat perang antara Israel dan Negara Lebanon pada awal Juli 2006. Selama pertikaian bersenjata tersebut, tentara Israel (*Israel Defense Forces-IDF*) telah empat kali melakukan penyerangan terhadap alat transportasi bertanda palang merah baik itu milik pemerintah Lebanon maupun milik ICRC yang menyebabkan puluhan relawan medis luka parah.²

Pada bulan September 2024 di Ukraina juga sebuah kendaraan misi kemanusiaan ICRC diserang di wilayah

¹ <https://www.kompas.com/kompas-cetak/0311/03/opini/664372.htm> diakses tanggal 20 April 2025 pukul 19.00 WIB.

² <http://nanaip.multiply.com/journal/> diakses tanggal 20 April 2025 pukul 19.25 WIB.

Donetsk, menyebabkan 3 staf ICRC tewas.³

Sebagaimana yang tertera pada laporan yang penulis sajikan, dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan, petugas masih sering mengalami kondisi yang sangat berisiko dan berbahaya. Selain dari dampak penyerangan yang terjadi, juga terjadi insiden yang sangat memilukan dan tak terakses oleh media dan dunia internasional.

Seperti anggota bersenjata yang masuk kedalam rumah sakit dengan paksa dan merusak peralatan medis yang ada, penyerangan yang dilakukan terhadap ambulans yang digunakan untuk membawa korban yang luka dan sakit juga merupakan rangkuman laporan berdasarkan informasi yang dikumpulkan dari tahun 2012 dan 2013, ada sekitar 1.809 terjadi di 23 negara, kekerasan yang telah diterima oleh para penghuni rumah sakit, transportasi rumah sakit atau fasilitas kesehatan.⁴

³<https://www.metrotvnews.com/read/b3JCrlx-mobil-palang-merah-diserang-di-ukraina-tiga-pekerja-dilaporkan-tewas> diakses tanggal 20 April 2025 pukul 19.40 WIB.

⁴<https://www.icrc.org/eng/assets/files/publications/icrc-002-4196.pdf> diakses tanggal 20 April 2025 pukul 20.15 WIB.

B. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan cara studi dokumen yaitu berdasarkan literatur serta peraturan yang ada kaitannya dengan pembahasan penulis, tetapi juga akan dibandingkan dengan pendapat para ahli yang ada.⁵ Adapun sifat dari penulisan ini yaitu bersifat deskriptif yang mana artinya untuk dapat memberikan suatu gambaran dengan baik, jelas dan berurutan perihal terkait perlindungan ICRC dalam konflik bersenjata internasional menurut Konvensi Jenewa Tahun 1949.

C. Pembahasan

1. Perlindungan Terhadap *International Committee of the Red Cross (ICRC)* dalam Konflik Bersenjata Internasional Menurut Konvensi Jenewa 1949

Prinsip perlindungan merupakan prinsip penting dalam hukum humaniter. Menurut Kushartoyo prinsip perlindungan bagi petugas kemanusiaan khususnya ICRC diartikan bahwa dalam menjalankan aktivitasnya petugas ICRC harus

⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta : PT. Grafindo Persada, 2001), hlm. 45.

dihormati dan tidak dijadikan sasaran serangan.⁶

Kata dihormati mengandung arti petugas ICRC diberi kemudahan, tidak diganggu atau dihalang-halangi serta diberikan akses/fasilitas sehingga mampu melaksanakan aktifitasnya dengan leluasa serta dijamin keselamatannya dalam memberikan bantuan terhadap kemanusiaan. Tidak dijadikan sasaran serangan artinya dalam menjalankan aktifitasnya sebagai target dalam setiap operasi penyerangan.

Pengaturan perlindungan terhadap ICRC dalam konflik bersenjata internasional tersebar di beberapa pasal dalam Konvensi Jenewa 1949. Adapun pasal-pasal dalam Konvensi Jenewa 1949 yang mengatur perlindungan terhadap ICRC dalam konflik bersenjata internasional, yaitu :

- a. Pasal 9 Konvensi Jenewa I, II,III, Pasal 18 Konvensi Jenewa I, Pasal 10, Pasal 17 dan Pasal 63 Konvensi Jenewa IV.

Ketentuan dari pasal-pasal ini mengatur tentang perlindungan

terhadap ICRC, dimana perlindungan yang diberikan berupa penghormatan dalam menjalankan tugas pada saat waktu konflik bersenjata berlangsung. Penghormatan terhadap ICRC adalah ICRC harus selalu dibiarkan atau diizinkan untuk melaksanakan tugas-tugas kemanusiaannya, tidak ada satu pihakpun maupun suatu hal apapun yang boleh menghalangi atau membatasi tugas ICRC.

- b. Pasal 19, Pasal 21 dan Pasal 34 Konvensi Jenewa I dan Pasal 23 Konvensi Jenewa II.

Ketentuan dari pasal-pasal ini mengatur tentang perlindungan bagi bangunan-bangunan tetap yakni berupa gedung, tenda, rumah sakit, depot-depot kesehatan, poliklinik, rumah sakit lapangan (*lazaret*), tempat penyimpanan barang bantuan untuk korban perang, dll. Dan kesatuan-kesatuan bergerak yakni berupa alat transportasi didarat, dilaut serta diudara milik ICRC yang berada dalam situasi konflik bersenjata internasional.

- c. Pasal 38, Pasal 39 dan Pasal 44 Konvensi Jenewa I, dan Pasal 41 serta Pasal 44 Konvensi Jenewa II.

⁶ ICRC, *Mengenal Lebih Jauh Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional*, (Indonesia, ICRC, 2005), hlm. 35.

Ketentuan pasal-pasal ini mengatur tentang penggunaan lambang kemanusiaan berupa Lambang Palang Merah, Bulan Sabit dan Kristal Merah yang berfungsi sebagai lambang pengenalan dan pelindung bagi ICRC pada saat menjalankan tugasnya dalam konflik bersenjata internasional. ICRC boleh menggunakan lambang ini setiap saat baik pada masa damai maupun pada masa konflik bersenjata tanpa pembatasan.

- d. Pasal 24 Konvensi Jenewa I, Pasal 36 dan Pasal 37 Konvensi Jenewa II dan Pasal 20 Konvensi Jenewa IV.

Ketentuan dari pasal-pasal ini mengatur tentang perlindungan terhadap anggota ICRC yang sedang melaksanakan tugas dalam situasi konflik bersenjata internasional baik di wilayah darat maupun dalam kapal kesehatan.

- e. Pasal 46 Konvensi Jenewa I dan Pasal 47 Konvensi Jenewa II.

Ketentuan kedua pasal ini mengatur tentang perbuatan balasan kepada setiap orang yang diberi perlindungan oleh Konvensi Jenewa 1949. Ketentuan ini dengan tegas dan mutlak melarang

dilakukannya tindakan kekerasan sebagai tindakan pembalasan (*reprisal*) terhadap korban yang luka, sakit dan kapal karam dan juga terhadap kapal-kapal, para pegawai dan gedung-gedung serta perlengkapan yang dilindungi Konvensi Jenewa 1949.

- f. Pasal 20, Pasal 35 dan Pasal 36 Konvensi Jenewa I 1949, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 29 dan Pasal 39 Konvensi Jenewa II 1949, dan Pasal 21 serta Pasal 22 Konvensi Jenewa IV 1949.

Ketentuan dalam pasal-pasal ini mengatur tentang perlindungan terhadap alat transportasi yang digunakan ICRC dalam menjalankan tugas dalam konflik bersenjata internasional. Seperti alat transportasi di darat (ambulans, truk, mobil, dll) transportasi udara (pesawat, helikopter, dll) transportasi laut (kapal, perahu, sekoji) keseluruhan alat transportasi tersebut harus mendapat penghormatan dan perlindungan dari pihak yang bertikai.

- g. Pasal 73, Pasal 75, Pasal 125 dan Pasal 126 Konvensi Jenewa III 1949.

Ketentuan dalam pasal-pasal ini mengatur tentang perlindungan terhadap anggota ICRC dalam menjalankan tugas mengunjungi dan memberikan bantuan kepada tawanan perang. Dalam hal ini ICRC memiliki kedudukan istimewa, dimana ICRC harus selalu dihormati dan dilindungi. Pada saat melaksanakan tugasnya ini keamanan, kebutuhan dan segala fasilitas yang diperlukan ICRC sudah terjamin dan tersedia. Hak ICRC untuk berprakarsa dalam memberikan kiriman kepada tawanan perang tidak boleh dibatasi oleh siapapun dan oleh hal apapun.

- h. Pasal 59, Pasal 109, Pasal 111, Pasal 142 dan Pasal 143 Konvensi Jenewa IV 1949.

Ketentuan dalam pasal-pasal ini mengatur tentang perlindungan terhadap ICRC dalam menjalankan tugas pengiriman bantuan kepada penduduk sipil dan kaum interniran. Negara penahan harus menjamin keamanan dan kebutuhan berbagai fasilitas yang diperlukan ICRC. Selain itu, Pihak Penahan juga harus memberikan izin lalu lintas bebas terhadap kiriman barang bantuan ICRC, dan

ICRC juga berhak bertindak untuk menjamin pengangkutan kiriman-kiriman sumbangan tersebut. Ketentuan-ketentuan mengenai kiriman kolektif untuk kaum interniran yang diatur dalam Konvensi Jenewa 1949 sama sekali tidak boleh dibatasi.

Menurut Kushartoyo bentuk perlindungan terhadap ICRC berupa pemberian kemudahan dan akses untuk bekerjanya ICRC dalam menjalankan aktifitasnya, memungkinkan pemberian bantuan kemanusiaan kepada korban perang, memberikan izin dan kemudahan pada saat petugas ICRC mengunjungi para tawanan perang, memberikan akses atau konvoy bantuan kemanusiaan, memberikan kemudahan kepada petugas ICRC dalam menyebarluaskan isi Konvensi Jenewa 1949 atau hukum humaniter internasional di wilayah negara, tidak menjadikan petugas ICRC dan petugas palang merah atau bulan sabit sebagai sasaran serangan, begitu juga kendaraan-kendaraan dan obyek-obyek lain

yang menggunakan lambang-lambang tersebut.⁷

Dari uraian perlindungan bagi ICRC dalam konflik bersenjata internasional berdasarkan Konvensi Jenewa 1949, bahwa Konvensi Jenewa 1949 memberikan penghormatan dan perlindungan khusus kepada ICRC. Perlindungan khusus yang diberikan pada ICRC tidak hanya terbatas pada anggota ICRC yang melaksanakan tugas dalam konflik bersenjata internasional. Perlindungan ini juga berlaku pada seluruh fasilitas dan alat kelengkapan milik ICRC misalnya, alat transportasi kesehatan di darat, laut dan udara yang digunakan untuk pengangkutan korban, anggota ICRC, perlengkapan ICRC dan untuk alat distribusi bantuan bagi korban.

Kesemua komponen ICRC tersebut akan selalu mendapatkan perlindungan khusus selama menjalankan tugas sesuai dengan misi kemanusiaan yang diembannya dan mendapat izin dari pihak-pihak yang bertikai.

⁷ ICRC, *Kekerasa dan Penggunaan Kekuatan*, (Indonesia : Bersama Indonesia, Tanpa Tahun), hlm. 15.

Perlindungan khusus itu akan berakhir bila ICRC bertindak menyeleweng dari tanggung jawab dan kewajiban kemanusiaannya, seperti turut serta dalam pertikaian, menjadikan gedung-gedung ICRC sebagai tempat penyimpanan senjata dan tempat persembunyian pihak yang bertikai, menjadikan alat transportasi ICRC sebagai armada perang, dll.

Namun berdasarkan uraian peraturan yang telah penulis jabarkan, bahwasannya pada realitanya masih terdapat pelanggaran yang dilakukan terkait pematuhan untuk dapat melindungi dan menghormati para anggota medis beserta atributnya, adanya ketidaksesuaian antara instrument yang telah dibentuk dengan kenyataan. Didalam Konvensi Jenewa 1949 perlindungan terhadap ICRC ini telah diatur dengan sedemikian indahnya namun fakta dilapangannya para anggota kesehatan tidak jarang diserang oleh para militer dan tidak terhitung juga orang yang terbunuh tidak dapat ke rumah sakit tepat waktu karena ambulans dan bangunan-bangunan milik ICRC menjadi target penyerangan dalam

menjemput korban konflik bersenjata, akibatnya banyak orang tua tidak mendapatkan perawatan, anak-anak tidak dapat dievakuasi dan para wanita-wanita yang sedang hamil tidak dapat diselamatkan setelah serangan yang ditujukan terhadap rumah sakit, sehingga para dokter terpaksa menyaksikan pasien meninggal karena kehabisan obat-obatan.

2. **Faktor Penghambat dalam memberikan Perlindungan Terhadap *International Committee of the Red Cross (ICRC)* dalam Konflik Bersenjata Internasional Menurut Konvensi Jenewa 1949**

Tujuan hukum humaniter internasional adalah untuk dapat menolong mereka yang menjadi korban penderitaan pada saat terjadinya peperangan serta melindungi mereka yang turut dalam peperangan maupun mereka yang tidak lagi turut dalam peperangan dengan sebaik mungkin.⁸

Pada saat berperang, para pihak yang bertikai sering tidak mau

mematuhi hukum humaniter internasional yang berlaku dan masih banyak diantara mereka yang melakukan pelanggaran sehingga menimbulkan penderitaan. Pelanggaran itu terkadang terjadi karena kurangnya pengetahuan masyarakat akan hukum humaniter internasional tersebut, kurangnya pengetahuan itu terjadi baik bagi pihak yang melanggar maupun yang menjadi korban pelanggaran.⁹

Begitu juga menurut Kushartoyo, faktor penghambat perlindungan terhadap ICRC berupa pemahaman dan pengetahuan tentang ICRC dan aktifitasnya, begitu juga pengetahuan dan pemahaman tentang hukum humaniter dikalangan masyarakat masih sangat kurang.¹⁰

Faktor lainnya adalah pada kenyataannya untuk mempraktikkan hukum humaniter internasional ini sangat sulit. Seperti dikatakan oleh Arlina Permatasari, sulitnya mengimplementasikan hukum

⁸ Yustina Trihoni Nelesti, *Kajahatan Perang dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo, 2003), hlm, 45.

⁹ Rubby Ellryz, *Perlindungan Relawan Kemanusiaan Dalam Konflik Bersenjata Menurut Hukum Humaniter*, Jurnal Lex ex Societatis, Vol.V/NO.2/Mar-Apr/2017, hlm. 47.

¹⁰ Kushartoyo BS, *Pengantar Hukum Humaniter*, (Jakarta | PT RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 66.

humaniter internasional ini disebabkan beberapa hal, yakni :¹¹

- a. Penerapan terhadap hukum humaniter internasional ini dilakukan pada saat yang genting dimana keseimbangan dan keamanan nasional suatu negara dipertaruhkan.
- b. Hukum humaniter internasional rumit dikarenakan penyusunannya dilakukan oleh para ahli hukum dan para diplomat yang menggunakan bahasan dan kalimat yang sulit untuk dipahami oleh banyak orang.
- c. Banyak ketentuan didalam hukum humaniter internasional tidak berjalan dengan baik, hal ini dapat terlihat daari hukuman yang diberikan kepada pelanggar konvensi tidak diterapkan secara langsung pada saat hal itu terjadi.

Selain itu terdapat juga faktor kesengajaan untuk tidak mematuhi hukum humaniter internasional. Sebagai contoh pada tanggal 24 Maret 2014, Ketua Komisi Penyelidikan Independen Internasional di Suriah yaitu Paulo Sergio memberikan

laporan bahwasannya rezim Al Assad sengaja menargetkan penyerangannya terhadap anggota medis, relawan kemanusiaan, rumah sakit dan ambulans agar tidak lagi dapat melakukan aksi kemanusiaannya, dan pada tahun sebelumnya Presiden Perancis, yakni Dr Marie Allie juga menerangkan bahwasannya di Suriah rumah sakit sengaja dihancurkan, para medis juga ditangkap serta bantuan medis juga sengaja dijadikan target serangannya oleh pasukan Asad.¹²

Penyebab utama penderitaan dalam konflik bersenjata adalah ketidakmampuan untuk menghormati hukum yang berlaku, baik karena kurangnya sarana atau kemauan politik. Dalam beberapa tahun terakhir, penekanan telah diberikan untuk mengembangkan prosedur hukum pidana untuk menuntut dan menghukum mereka yang telah melakukan pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional, tapi cara yang tepat untuk menghentikan dan menyelesaikan pelanggaran ketika hal itu terjadi masih kurang. Sebagian besar prosedur yang diatur dalam hukum humaniter internasional belum

¹¹ Arlina Permatasari, *Pengantar Hukum Humaniter, International Committee Of The Red Cross*, (Jakarta : Miamita Print, 1999), hlm. 65.

¹² <http://www.bumisyam.com> diakses tanggal 22 April 2025 pukul 12.00 WIB.

atau hampir tidak pernah digunakan dalam prakteknya.¹³

Faktor lainnya yaitu tidak efektifnya sanksi yang diberikan kepada pihak yang melakukan pelanggaran. Pelanggaran hukum humaniter internasional bersifat tanggung jawab pidana. Ketentuan dalam hukum humaniter internasional masih belum bisa terlaksanakan dengan efektif, hal ini dapat dilihat dari sisi sanksi hukum pidana yang diberikan kepada mereka yang telah melakukan pelanggaran kejahatan masih kurang tegas dan bahkan ternyata mereka yang melakukan pelanggaran tersebut tidak dijatuhi sanksi pidana apapun.

Kurangnya pengetahuan mengenai hukum humaniter internasional menjadi pemicu kurangnya kesadaran akan pentingnya memahami bahwasannya para medis yang berada dalam perang tidak boleh diserang melainkan harus dilindungi dan dihormati. Tidak hanya itu, ketidakmauan para pihak yang bersengketa untuk dapat mematuhi hukum humaniter internasional juga menjadi salah satu penyebab dari

pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan kepada petugas medis beserta dengan fasilitasnya.

Oleh karena itu kita memerlukan penegakan hukum yang bertujuan untuk menjaga agar hukum itu dipatuhi. Penegakan hukum dapat dilakukan dengan paling tidak dua cara, yaitu : pertama, menumbuhkan kesadaran hukum dan kedua, dengan cara yang bersifat ancaman atau paksaan.¹⁴ Dalam penegakan hukum ada tiga unsur yang harus selalu diperhatikan, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Dalam penegakan hukum harus ada kesepakatan antara ketiga unsur tersebut. Ketiga unsur tersebut harus mendapat perhatian yang seimbang. Namun, dalam prakteknya tidak selalu mudah untuk mengusahkannya.¹⁵

Demikian juga atas berlakunya hukum humaniter yang merupakan bagian dari hukum internasional, di perlukannya upaya-upaya tertentu agar pihak-pihak yang bertikai mau mematuhi. Sehingga tujuan dari

¹³ ICRC, *Hukum Humaniter Internasional Menjawab Pertanyaan Anda*, Indonesia, tanpa tahun, hlm. 15.

¹⁴ Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Hukum Internasional*, (Bandung : Alumni, 2003), hlm. 86.

¹⁵ Syafrinaldi, Husnu Abadi dan Zul Akrial, *Hukum dan Teori Dalam Realita Masyarakat*, (Pekanbaru : UIR Press, 2015), hlm. 18.

hukum humaniter tersebut akan tercapai, yaitu memberikan perlindungan kepada pihak-pihak yang menjadi korban pertikaian bersenjata. Adapun upaya-upaya tersebut antara lain : menumbuhkan kesadaran dan melakukan ancaman atau paksaan seperti melakukan tindakan reprisal dan mengadili.¹⁶

D. Kesimpulan

Perlindungan *International Committee of the Red Cross* (ICRC) dalam konflik bersenjata internasional telah diatur didalam Konvensi Jenewa 1949, yang mana menyatakan ICRC adalah pihak yang netral didalam peperangan yang harus selalu mendapatkan perlindungan dan penghormatan dan tidak boleh sekalipun diserang dalam keadaan apapun. Namun kenyataan berbeda pada saat konflik terjadi tidak ada pihak yang bersengketa mematuhi peraturan terkait perlindungan ICRC ini. Hingga saat ini para anggota ICRC beserta atributnya terus mendapat penyerangan. Penyerangan terhadap ICRC termasuk kedalam jenis pelanggaran berat. Dengan begitu, maka segala jenis pelanggaran yang dilakukan

terhadap konvensi ini dapat menjadi sebuah tindakan pelanggaran yang dilakukan kepada konvensi.

Terdapat beberapa hambatan di dalam upaya perlindungan terhadap *International Committee of the Red Cross* (ICRC) dalam konflik bersenjata internasional yaitu kurangnya pengetahuan mengenai hukum humaniter internasional, sulitnya mengimplementasikan hukum humaniter internasional pada saat terjadinya konflik bersenjata, adanya kendala-kendala saat hukum humaniter internasional tersebut diterapkan dalam situasi perang, adanya faktor kesengajaan untuk tidak mematuhi hukum humaniter internasional, ketidakmampuan untuk menghormati hukum yang berlaku dan tidak efektifnya sanksi yang diberikan kepada pihak yang melakukan pelanggaran.

Daftar Pustaka

Buku

Arlina Permatasari, *Pengantar Hukum Humaniter, International Committee Of The Red Cross*, Jakarta : Miamita Print, 1999.

ICRC, *Hukum Humaniter Internasional Menjawab Pertanyaan Anda*, Indonesia, tanpa tahun.

ICRC, *Kekerasa dan Penggunaan Kekuatan*, Indonesia : Bersama Indonesia, Tanpa Tahun.

¹⁶ Levina Yustitianiingtyas, *Perlindungan Orang Sipil Dalam Hukum Humaniter Internasional*, Jurnal Komunikasi Hukum, Vol. 2 No.1, Februari 2016, hlm. 8.

ICRC, *Mengenal Lebih Jauh Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional*, Indonesia, ICRC, 2005.

Kushartoyo BS, *Pengantar Hukum Humaniter*, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2007.

Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Hukum Internasional*, Bandung : Alumni, 2003.

Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta : PT. Grafindo Persada, 2001.

Syafrinaldi, Husnu Abadi dan Zul Akrial, *Hukum dan Teori Dalam Realita Masyarakat*, Pekanbaru : UIR Press, 2015.

Yustina Trihoni Nelesti, *Kajahatan Perang dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional*, Jakarta : PT. Raja Grafindo, 2003.

Karya Ilmiah

Levina Yustitiantingtyas, *Perlindungan Orang Sipil Dalam Hukum Humaniter Internasional*, Jurnal Komunikasi Hukum, Vol. 2 No.1, Februari 2016.

Rubby Ellryz, *Perlindungan Relawan Kemanusiaan Dalam Konflik Bersenjata Menurut Hukum Humaniter*, Jurnal Lex ex Societatis, Vol.V/NO.2/Mar-Apr/2017.

Perjanjian Internasional

Konvensi Jenewa Tahun 1949 Tentang Perlindungan Terhadap Korban Perang

Sumber Lainnya

<https://www.kompas.com/kompas-cetak/0311/03/opini/664372.htm> diakses tanggal 20 April 2025 pukul 19.00 WIB.

<http://nanajp.multiply.com/journal/> diakses tanggal 20 April 2025 pukul 19.25 WIB.

<https://www.metrotvnews.com/read/b3JCrlx-mobil-palang-merah-diserang-di-ukraina-tiga-pekerja-dilaporkan-tewas> diakses tanggal 20 April 2025 pukul 19.40 WIB.

<https://www.icrc.org/eng/assets/files/publications/icrc-002-4196.pdf> diakses tanggal 20 April 2025 pukul 20.15 WIB.

<http://www.bumisyam.com> diakses tanggal 22 April 2025 pukul 12.00 WIB.